

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kampung Keluarga Berkualitas (KB) merupakan penyelenggaraan pemberdayaan keluarga pada tingkat desa atau kelurahan dengan tujuan peningkatan kualitas keluarga dan masyarakat (Prabowo & Anggoro, 2020). Kampung KB menjadi suatu inovasi dari kebijakan pemerintah sebagai wadah strategis dalam mengimplementasikan program KB sehingga agenda prioritas pembangunan kependudukan terutama pada pengendalian penduduk dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Pelaksanaannya diamanahkan kepada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Kebijakan ini diatur dalam UU No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, sebagai landasan pembangunan Kampung KB dan pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) di dalamnya. Melalui Kampung KB, program KB dapat dilaksanakan karena terdapatnya penggerak program yaitu peran aktif dari Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), kader KB, pemerintah desa atau kelurahan, serta dukungan lintas sektor lainnya seperti tenaga kesehatan dan organisasi masyarakat (BKKBN, 2024). Pelaksanaan KB dalam Kampung KB berfokus menjalankan fungsi reproduksi dari delapan fungsi keluarga yang ada (Herawati dkk., 2020). Fungsi reproduksi ini berupa kesepakatan keluarga untuk mengatur jumlah anak, jarak kelahiran, kesehatan reproduksi serta pendidikan seksual yang baik untuk anak sehingga kesehatan anak dan kesejahteraan keluarga dapat tercapai (BKKBN, 2017).

Di sisi lain, berjalannya fungsi reproduksi pada Kampung KB ini sering kali dihadapkan dengan bermacam tantangan, salah satunya adalah tantangan pada penyampaian informasi mengenai KB kepada masyarakat

khususnya untuk Pasangan Usia Subur (PUS) (Purnawati dkk., 2024). Masalahnya, meskipun yang menjadi sasaran penyampaian informasi KB adalah PUS secara umum, kenyataannya informasi mengenai KB hanya lebih banyak diterima oleh perempuan (Nyoman Dalem, 2012). Hal ini membuat informasi mengenai KB tidak menjangkau seluruh PUS, karena keterlibatan suami atau pihak laki-laki sebagai bagian dari PUS sangat minim (Nadyah & Afiif, 2020). PUS masih ada yang belum mengetahui mengenai informasi dasar KB serta sebagiannya lagi masih belum memahami jenis-jenis alat kontrasepsi, manfaat dan dampak penggunaannya (Oviana & Putri, 2016). Informasi yang didapatkan juga seringkali terbatas karena salah satunya disebabkan oleh proses sosialisasi sebagai wadah penyampaian informasi belum dilaksanakan secara optimal (Amin dkk., 2022). Sosialisasi menjadi hal penting untuk menyampaikan informasi edukasi karena bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman, kesadaran, dan partisipasi terhadap suatu program tertentu sesuai dengan Permenkes No. 21 Tahun 2021 mengenai pemberdayaan masyarakat mengenai KB melalui sosialisasi (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021). Begitu juga dengan penyampaian informasi mengenai KB melalui sosialisasi KB yang menjadi sarana utama penyampaiannya juga sering kali belum berjalan secara optimal karena keterbatasan interaksi aktif antara PUS dengan kader KB untuk ruang bertanya dan lebih memahami lebih dalam (Azzahra dkk., 2024). Selain itu, proses sosialisasi yang belum optimal berhubungan dengan aspek-aspek yang dapat menunjang pelaksanaannya juga belum terpenuhi seperti fasilitas sumber daya manusia dan sarana prasarana yang digunakan (Sinurat, 2022). Kemudian terbatasnya jumlah dan kapasitas pelaksana sosialisasi yang dapat menyampaikan materi sosialisasi dengan konsisten dan kurang dalam menjangkau PUS (Nainggolan, 2023).

Kendala penyampaian informasi mengenai KB salah satunya terjadi di Kampung KB Kemuning, Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi. Kampung KB Kemuning ini menjalankan fungsi reproduksi

kepada Pasangan Usia Subur (PUS). Berdasarkan observasi awal di Kampung KB Kemuning diketahui bahwa masih banyaknya PUS yang memiliki anak dengan jarak kelahiran dengan kehamilan berikutnya yang terlalu dekat tidak mempertimbangkan kondisi ibu, anak bahkan bagaimana kondisi ekonomi keluarga. Kemudian diketahui bahwa sebelumnya belum pernah dilaksanakan sosialisasi khusus mengenai KB untuk PUS. Penyampaian informasi hanya sebatas penyampaian dari pembicaraan biasa yang dilakukan oleh kader KB yang mengajak PUS perempuan untuk menjadi akseptor dengan kurangnya penjelasan yang rinci mengenai hal-hal penting yang perlu diketahui oleh PUS. Dari sisi sumber daya manusia (SDM), secara kuantitas kader KB di Kampung KB Kemuning dinilai telah mencukupi dan telah menjalankan tugasnya, misalnya dengan menyampaikan informasi KB saat pelaksanaan Posyandu. Namun, kualitas penyampaian informasi tersebut masih terbatas. Informasi KB yang disampaikan cenderung bersifat satu arah, lebih pada ajakan untuk menggunakan KB, tanpa memberikan ruang dialog yang memadai bagi PUS perempuan untuk bertanya atau memahami lebih dalam. Kader KB menyatakan bahwa mayoritas peserta kegiatan Posyandu yang menjadi sasaran informasi KB adalah perempuan, karena yang hadir dalam kegiatan Posyandu umumnya hanya ibu-ibu, sementara keterlibatan suami atau pihak laki-laki sangat minim. Kemudian adapun bidan yang menyampaikan materi kurang maksimal karena tugas bidan dalam kegiatan Posyandu. Selain itu, kegiatan penyampaian informasi seringkali dibagi dengan kegiatan lain seperti imunisasi, sehingga suasana menjadi kurang kondusif. Selanjutnya untuk fasilitas sarana prasarana masih terdapat kekurangan, seperti layar proyektor, proyektor, laptop dan alat peraga serta ukuran ruangan yang masih terbatas.

Berdasarkan hal tersebut pelaksanaan Program KB di Kelurahan Kali Baru belum berjalan dengan baik, PUS perlu mendapatkan pemahaman mengenai KB lebih dalam. Maka dari itu dilakukannya sosialisasi KB secara perdana di Kampung KB Kemuning untuk memberikan informasi kepada

PUS mengenai KB, metode kontrasepsi yang efektif dalam mencegah kehamilan, serta bagaimana cara untuk mengakses pelayanan KB agar PUS mampu memilih alat kontrasepsi sesuai dengan kondisi masing-masing dan dapat mengakses pelayanannya (Rompah dkk., 2023). Tujuan dari sosialisasi ini tidak hanya sebatas menyampaikan informasi, tetapi juga menumbuhkan kesadaran PUS mengenai pentingnya perencanaan keluarga demi tercapainya kesejahteraan. Sosialisasi ini memiliki karakteristik khusus yaitu dengan memanfaatkan penggunaan media sosialisasi berupa media audio visual yang dapat membantu PUS mengetahui KB (Wirawan dkk., 2014). Seperti gambaran jenis, bentuk alat kontrasepsi, cara penggunaannya dan efek samping dengan bantuan animasi berwarna, singkat, menarik, terdapat suara dan terdapat tulisan sebagai teks yang jelas. Sehingga PUS mendapatkan gambaran mengenai informasi yang disampaikan.

Setelah pelaksanaan sosialisasi dilakukan, untuk mengetahui ketercapaian tujuan sosialisasi perlu dilakukannya kegiatan evaluasi. Evaluasi merupakan suatu proses untuk mengetahui nilai dari suatu hal dengan menghasilkan keputusan (Anwar, 2021). Pada sosialisasi ini evaluasi menjadi sebuah alat ukur ketercapaian sosialisasi. Seperti apakah kegiatan telah berjalan sesuai rencana, sumber daya manusia maupun sarana prasarana telah dimanfaatkan secara efektif serta apakah sasaran telah mendapatkan manfaat yang diharapkan (Anzhari, 2025). Di sisi lain, dilakukannya evaluasi tidak hanya untuk mengetahui ketercapaian tujuan sosialisasi saja melainkan menjadi hal yang lebih penting karena pelaksanaan sosialisasi di Kampung KB Kemuning ini perdana dilaksanakan. Sehingga evaluasi sangat diperlukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Evaluasi dilakukan tidak hanya untuk menilai hasil akhir, tetapi juga sebagai sarana untuk mengamati dan memperbaiki proses yang sedang berjalan. Untuk itu evaluasi yang dilakukan adalah kegiatan evaluasi mencakup konteks, input, proses dan hasil (*context, input, process* dan *product*) berdasarkan model evaluasi

CIPP. Hal yang dievaluasi terdiri dari konteks (*context*) untuk mengetahui kesesuaian kebutuhan yang dilayani dan melayani. Input untuk mengetahui ketersediaan fasilitas pendukung sosialisasi yang berupa sumber daya manusia dan sarana prasarana. Proses (*process*) untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sosialisasi dan yang terakhir produk (*product*) untuk mengetahui partisipasi peserta sosialisasi (Turmuzy dkk., 2022).

Model CIPP digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan sosialisasi program KB karena dapat memberikan gambaran secara menyeluruh sosialisasi tidak hanya mengenai prosesnya atau hasilnya saja melainkan keduanya. Artinya model evaluasi ini mencakup evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi formatif merupakan evaluasi yang dilakukan saat proses pelaksanaan program masih berjalan dengan tujuan untuk mengidentifikasi aspek dari berjalannya program yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki. Evaluasi formatif dalam CIPP meliputi konteks, input dan proses (Fetrianto, 2017). Kemudian evaluasi sumatif merupakan evaluasi yang dilakukan setelah pelaksanaan program dengan tujuan untuk mendapatkan keberhasilan akhir. Evaluasi sumatif dalam CIPP meliputi produk (Putri & Zakir, 2023). Sehingga evaluasi sosialisasi KB dilakukan secara menyeluruh menggunakan Model Evaluasi CIPP. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Pelaksanaan Sosialisasi Program Keluarga Berencana Menggunakan Model CIPP di Kelurahan Kali Baru Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka identifikasi masalah penelitian adalah sebagai berikut :

1. Kampung KB Kemuning belum pernah melaksanakan sosialisasi KB secara khusus kepada Pasangan Usia Subur (PUS), sehingga

pemahaman PUS terkait program KB masih rendah. Selama ini informasi yang diterima hanya bersifat satu arah dan tidak disampaikan secara mendalam, yang menyebabkan pemahaman dan partisipasi aktif PUS dalam program belum optimal. Kualitas penyampaian informasi oleh kader KB masih terbatas dan tidak didukung oleh interaksi aktif. Peran bidan dalam penyampaian materi juga belum maksimal karena terbagi dengan tugas lain saat kegiatan Posyandu berlangsung. Selain itu, sarana dan prasarana pendukung seperti media visual, alat peraga, dan ruang kegiatan masih belum memadai, sehingga menghambat kelancaran dan efektivitas pelaksanaan sosialisasi.

2. Sosialisasi KB pertama yang dilaksanakan dengan menggunakan media audio visual menjadi inovasi dalam penyampaian informasi kepada PUS. Namun, pelaksanaannya belum dievaluasi secara menyeluruh sehingga belum dikethauli sejauh mana kegiatan sosialisasi sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
3. Diperlukan evaluasi terhadap pelaksanaan sosialisasi ini menggunakan model evaluasi CIPP, karena model evaluasi ini memiliki kelebihan berupa fleksibilitas dan tidak hanya menilai hasilnya saja tetapi juga prosesnya yaitu terdapat evaluasi formatif dan sumatif.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan hasil identifikasi masalah, maka batasan masalah pada penelitian ini adalah evaluasi CIPP (*Context, Input, Process and Product*) pelaksanaan sosialisasi program KB di Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian adalah “Bagaimana evaluasi CIPP pada pelaksanaan sosialisasi program KB di Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi?”

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dari evaluasi pelaksanaan sosialisasi program KB adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian evaluasi pelaksanaan program sosial seperti Program KB. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi salah satu referensi atau acuan bagi penelitian selanjutnya yang membahas evaluasi program dengan pendekatan serupa.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk menambah wawasan penulis mengenai evaluasi, khususnya dalam mengevaluasi pelaksanaan sosialisasi Program KB.

b) Bagi Masyarakat

Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya sosialisasi KB serta mendorong keterlibatan mereka secara aktif dalam mendukung dan mengikuti kegiatan KB di lingkungan sekitar.